

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, 2012, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing;
- Emmy Yuhassarie (ed.), 2005, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum;
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua (Sinar Grafika, 2022)*.
- LAPS SJK, Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2023;
- LAPS SJK, Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2024;
- Moeleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya;
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press;
- Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta;
- Panji Adam Agus Putra, Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016;
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### JURNAL HUKUM

- Adi Wijaya, *“Analisis Penyelesaian Sengketa Fintech Menggunakan BPSK dan LAPS di Indonesia”*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2, Desember 2023;
- Alif Rizqi Ramadhan dan Albertus Sentot Sudarwanto, *“Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)”*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No.2 Juni 2024;
- Bernardo Aldo Tambunan, *“Analisis tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen”*, Vol.2 No.2 Oktober 2024, Journal of Law Education and Business;
- Elin Sudiarti, Nuraliah Ali, *“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online”*, Palangka Law Review volume 03 Issue 1, Maret 2023
- Esther Van Den Heuvel, *“Online Dispute Resolution As A Solution To Cross-Border E-Disputes”*, Law Computer Science, (2000): 8-12  
<https://www.semanticscholar.org/paper/Online-disputeresolution-as-a-solution-to-an-to-Heuvel/Esther/65e0a2857887c5f9584ce30f31e738c681dda534>
- Ethan Katsh, *“Online Dispute Resolution: Some Implications for the Emergence of Law in Cyberspace1,”* International Review of Law, Computers & Technology 21, no. 2 (July 2007): 3,  
<https://doi.org/10.1080/13600860701492096>.

- Gagah Satria Utama, "Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice," 2<sup>nd</sup> edition
- Hapsari, et.al. "Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi UMKM Melalui Penerapan *Fintech* Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Dan Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Lampung)," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2, July 2022;
- Harnowo Tri, Shahab Fahmi, "Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 54 No.3, 30 September 2024
- Habibah Nur Pitriya, Devi Siti Hamzah Marpaung, "Upaya Penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap OJK", *Jurnal Panorama Hukum*, 2020;
- Herdifa Pratama, "*Penyelesaian Sengketa Equity Crowdfunding Syariah melalui Kelembagaan Alternative Dispute Resolution Terintegrasi*", Volume 5 Nomor 2, Desember 2023, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*;
- Imanuel Adhitya, Wulana Chrismastianto, "*Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia*", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, No 1 Vol (2017);
- Jameaba Muyanja, "Digitalization, Emerging Technologies, and Financial Stability: Challenges and Opportunities for the Indonesian Banking Sector and Beyond," *SSRN Electronic Journal*, 2024;
- Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017);
- Mangei Brenda Roselyn, "Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020);
- Meline Gerarita Sitompul, "*Urgensi Legalitas Financial Teknologi (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia*", *Jurnal Yuridis Unaja* 1, No. 2 (2018);
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "*Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda*", *Jurnal Studi Pemuda* 7, No. 2 (2018);
- Muthiah Candyna, Umar Mubdi, "Tantangan dan Peluang Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen di Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)", *Viva Justicia: Journal of Private Law* Volume 2 No.1, 2025
- Najwa Lathfa Asila, et.al. "*Online Dispute Resolution Berbasis Artificial Intelligence: Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online Dalam Peer-To-Peer Lending*", *Palangka Law Review: Volume 4 (2)*, September 2024;
- Pramesti, et al. "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK)." *Law, Development and Justice Review* 8, no. 1 (2025): 52-68. Accessed: October 23, 2025;
- Rahyani Sri Wiwin, "Upaya Meningkatkan Pelindungan Konsumen di Sektor Keuangan Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

- tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”, Jurnal Prodigy, Vol.11, No.1 Juli 2023
- Rama Ari Gede Bagus, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS SJK: Perspektif Kepastian Hukum”, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, 2022;
- Ramadhan Fahmi Budi Raharja, “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pada Layanan Peer to Peer Lending di Indonesia, Recital Review, Volume 6 No.2, 2024;
- Risna Kartika. et.al. (2021). “Tingkat Wanprestasi 90 Peer to Peer Lending Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia”. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi Volume 14(1);
- Sari, A.G. et. al. (2022). “Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia”. Jurnal Transparansi Hukum, Volume 5(1);
- Satrio Iqbal dkk, “Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, doi: 10.28946/sc.v27i2.1035;
- Setiyono Setiyono et al., “The Establishment of LAPS SJK in the Trajectory of History Viewed from the Politics of Indonesian Law,” Jurnal Hukum Novelty 15, no. 1 (April 2024);
- Suprapdi, “Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) pada Securites Crowdfunding di Indonesia”, Volume 2 Nomor 1, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah;
- Uzul Rahmayani “Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal 2, no. 1 (2018);
- Waluyo dkk, “Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Fintech di Era Industri 4.0”, Jurnal Kewarganegaraan vol.7 No.2 Desember 2023
- Yustyawan, G.Y.,dkk, “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/Pid/2010”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.2, Juli 2019.

## INTERNET

- AFPI, 2023, “Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab;
- Abraham Dervian dan Roka Hanan, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS SJK: Pengaturan Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia”, [ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LAPS SJK: PENGATURAN SENGKETA KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA - A&Co Law](#);
- Bagus SD Nur Buwono, “Penerapan Kebijakan Standstill Akibat Debitur Gagal Bayar Pada Layanan Peer to Peer (P2P) Lending: Masalah atau Solusi?”, yang disampaikan pada Webinar Series LAPS SJK Law Fair 2025

- Damayanti, A. (2024). *Jumlah Pinjol di Indonesia Makin Tinggi, Kini Tembus Rp66,79 Triliun*, available online from: <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7475688/jumlah-pinjol-di-indonesia-makin-tinggi-kini-tembusrp-66-79-triliun>
- Danang Sugianto, *YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online*, diterima dari: <https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online>
- [FAQ POJK 22 Tahun 2023 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.pdf](#)
- Ferdianto, A. et.al. (2024). *Gagal Bayar Fintech 2P2 Lending Semakin Marak, Ini Pemicunya*. available Online from: <https://keuangan.kontan.co.id/news/gagal-bayar-fintech-p2p-lending-semakin-marak-inipemicunya>.
- Intan Nur Rahmawanti, “ODR: Menuju Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Berkeadilan dan Transparan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/odr--menuju-penyelesaian-sengketa-konsumen-yang-berkeadilan-dan-transparan-lt68143f6fc45cf/?page=1>
- Iswanto Vovo, Inggrid Gratsya, “POJK 22/2023: Kepatuhan Pelindungan Konsumen di Tahun 2024”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-22-2023--kepatuhan-pelindungan-konsumen-di-tahun-2024-lt677e46eba2633/>
- LAPS SJK, Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2024  
LAPS SJK, Laporan Tahunan LAPS SJK Tahun 2023  
[LAPS SJK - Tentang Kami](#)  
[LAPS SJK - Mediasi](#)
- LAPS SJK, <https://lapssjk.id/page/berita/siaran-pers-laps-sjk-terima-1267-pengaduan-dengan-kategori-retail-small-claim-di-semester-i-2025-pengaduan-di-sektor-perbankan-masih-mendominasi>,
- M Agus Yozami, “*Pengaduan Layanan Fintech Didominasi Perilaku Petugas Penagihan*”, diterima dari: [Pengaduan Layanan Fintech Didominasi Perilaku Petugas Penagihan](#), [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com);
- Mochammad Januar Rizki, *Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang terdapat di Perusahaan Fintech*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech>
- Nugraha Raihan Muhammad, S.H., “Prosedur Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengesahan-badan-hukum-perkumpulan-cl6163/>;
- Octaviano Adrianus, “OJK Awasi Tanggung Jawab Fintech Koin P2P Nasabah Bisa Tenang”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-awasi-tanggung-jawab-fintech-koinp2p-nasabah-bisa-tenang>
- Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Bulanan Statistik LPBBI dari bulan Januari 2025 sampai dengan Juni 2025”, diakses pada 21 September 2025

melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/olddefault.aspx>.

Primantoro Yoga Agustinus, “Rentetan Kasus Pinjaman Daring Deringkan Alarm Perbaikan”, <https://www.kompas.id/artikel/rentetan-kasus-pinjaman-daring-deringkan-alarm-perbaikan>

Saputra Ferri, Perwitasari Suci Ana, “Menilik Masalah Gagal Bayar di Industri Fintech P2P Lending yang Tak Kunjung Usai”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/menilik-masalah-gagal-bayar-di-industri-fintech-p2p-lending-yang-tak-kunjung-usai>

Sekretariat Kadin Indonesia, “Peraturan OJK Dorong Integrasi Aspek Pelindungan Konsumen dan Masyarakat ke dalam Alur Bisnis PUJK”, [Peraturan OJK Dorong Integrasi Aspek Pelindungan Konsumen dan Masyarakat ke dalam Alur Bisnis PUJK - Kadin Indonesia](#)

#### **KARYA ILMIAH**

Adi Setiadi Saputra, “*Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending di Indonesia*”, Universitas Katolik Parahyangan 5, no 1 (2019);

Imam Baihaqi, “*Efektivitas Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Jawa Timur*”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004;

H Hartati, “Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia”, Tesis, Universitas Jambi, 2023;

Nadzya Tanazal E.Ar, “*Problematika Yuridis Alternatif Penyelesaian Sengketa Daring Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Financial Technology di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020;

Nugroho Febrian Aji, S.IP, S.H., “*Perlindungan Konsumen Dalam Layanan P2PL Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

Retno Ayu Wulandari, “*Desain Sistem Informasi Rekam Medik Elektronik Bpjs Kesehatan Menggunakan Teknologi Blockchain*”, Skripsi, Universitas Airlangga, 2020.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bab V Pasal 28-31 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pelembagaan Sektor Keuangan (P2SK);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;  
Bagian Penjelasan Peraturan OJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK);  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital;  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;  
Pasal 76 ayat (1) RPOJK Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI);  
Peraturan LAPS SJK Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi;  
Peraturan LAPS SJK Nomor 05 tentang Kode Etik Mediator;  
Peraturan LAPS SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa.

#### **WAWANCARA**

Wawancara dengan pak Erick selaku Kepala Divisi Kepatuhan dan Hubungan Kelembagaan LAPS SJK pada tanggal 14 Agustus 2025 dan 27 November 2025;  
Wawancara dengan pak Handrianto Wijaya selaku Kepala Divisi Penyelesaian Sengketa LAPS SJK pada tanggal 14 Agustus 2025;  
Wawancara dengan pak Bagus SD Nur Buwono selaku Mediator LAPS SJK pada tanggal 15 Agustus 2025;  
Wawancara dengan bu Surach Winarni selaku Mediator LAPS SJK pada tanggal 10 September 2025;  
Wawancara dengan Rizky Diah Ningrum selaku *borrower* pada *platform fintech* Kredivo pada tanggal 6 Agustus 2025;  
Wawancara dengan bu Evi Sungkar selaku *Head of Compliance* Alami Sharia pada tanggal 2 Oktober 2025.